

INTERAKSI POSITIF PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Baharuddin

(Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

Abstrak

Problematika antara lembaga pers, para jurnalis dan semacamnya dengan pemerintah telah berlangsung begitu lama. Terutama pada masa Orde Baru pimpinan Soeharto. Beberapa media cetak pernah ditutup (“Breidel”) saat itu, sebut saja, Majalah Tempo, Detik dan Editor. Peristiwa ini dikenal dengan “MALARI” (Malapetaka 15 Januari 1974). Munculnya konsep “Interaksi Positif” ini terkait dengan persoalan dimaksud. Rumusan konsep ini menjadi acuan sampai hari ini untuk memperkuat intraksi ketiga komponen dasar ini, yakni Pers, pemerintah, dan masyarakat.

Key Word: *Interaksi Positif*.

A. Pendahuluan

Ketika mengkaji apa saja tentang Aceh, termasuk soal pers (media massa) yang beraktifitas di Aceh sekarang dan akan datang, maka selalu saja terkait dengan dua peristiwa besar yang harus diangkat, *pertama*, tragedi gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami pada hari Ahad, 26 Desember 2004 yang menghancurkan ribuan rumah penduduk, gedung, toko, sekolah, jembatan dan lain-lain. Demikian pula, kehilangan ratusan ribu penduduk Aceh, anak-anak, remaja, dan orang tua. *Kedua*, konflik kekerasan kemanusiaan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Pusat (Jakarta) selama 30 tahun lebih dan telah berakhir secara damai, dengan ditandatangani Nota Kesepahaman untuk berdamai (MoU) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Finlandia, Martii Ahtisari, yang kemudian beliau dianugrahi Nobel Perdamaian tahun 2008.

Suasana damai ini telah terbuka ruang bagi pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan dunia Internasional untuk membantu membangun kembali Aceh dari kehancuran akibat gempa bumi, tsunami dan konflik kekerasan berkepanjangan tersebut.

Dua peristiwa besar ini telah memberikan pelajaran dan pengalaman sangat berharga bagi Aceh untuk bangkit kembali membangun negerinya dalam berbagai segi kehidupan. Maka, diperlukan kerjasama dan interaksi positif dari berbagai pihak, terutama pers, pemerintah dan masyarakat. Interaksi positif ketiga komponen ini (pers, pemerintah dan masyarakat) sangat diperlukan dalam merehabilitasi, merekonstruksi dan mempertahankan hasil-hasil rehab-rekon Aceh pasca tragedi dimaksud sekaligus mempertahankan suasana damai yang telah dicapai dengan susah payah di Serambi Mekkah ini. Dalam konteks ini, proses interaksi positif pers, pemerintah dan masyarakat sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama jika dilihat dari begitu besar pengaruh masing-masing komponen ini.

B. Konsep Interaksi Positif

Konsep “*Interaksi Positif*” ini secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-17 tahun 1997 di Solo, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan No.79/1974, tentang Pedoman Pembinaan Ideal Pers yang menyangkut peran ketiga komponen, yaitu Pers, Pemerintah dan Masyarakat. Konsep interaksi positif ini dibuat setelah pergolakan peristiwa politik tahun 1974, yang kemudian dikenal sebagai “*Peristiwa Malari*” (Malapetaka 15 Januari 1974) masa pemerintahan Orde Baru, pimpinan Soeharto. Peristiwa penting ini telah berimbas kepada ditutupnya (*dibreidel*) sejumlah penerbitan pers oleh pemerintah, seperti: *Harian Nusantara, Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, Harian Kami, The Jakarta Times, Mingguan Wenang dan Pemuda Indonesia, Ekspres, Mingguan Mahasiswa Indonesia* (Bandung), *Suluh Berita* (Surabaya), serta *Indonesia Pos* (Ujung Pandang) (Arifin Marzuki, 1974).

Peristiwa pembreidelan sejumlah surat kabar, baik *Harian* maupun *Mingguan*, semakain tergambar betapa kuatnya posisi pemerintah pada saat itu. Sehingga posisi pers senantiasa lemah dan bisa terancam. Mereka masih melihat wartawan dan pers sebagai sosok destruktif bagi “*political and economical interest*” (Abar, 1997).

Pers dalam sejarahnya selalu saja tidak berjalan mulus, baik masa kolonial, maupun masa republik, boleh dikata tidak pernah luput dari tekanan (*refresif*) penguasa. Hampir tiap hari pers bergelut dengan himbuan dan larangan, teguran, telepon, panggilan dan bahkan pencabutan SIUPP (*Surat Izin Usaha Penerbitan Pers*), seperti yang dialami

majalah *TEMPO*, *DETIK* dan *EDITOR* yang dibreidel secara sepihak dan tanpa proses pengadilan (Karnay, 1998).

Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri, pers juga banyak mendapat kritikan terkait dengan berbagai pemberitaan yang kurang sehat yang sering menimbulkan keresahan di dalam masyarakat akibat dari laporan media massa yang kurang bertanggung jawab.

Bukan rahasia lagi, munculnya banyak keluhan dan pengaduan yang disampaikan berbagai pihak secara lisan maupun tertulis tentang sikap dan cara wartawan dalam pengumpulan berita maupun profesionalitas dalam menyajikan berita, menyebabkan integritas pers di mata pemerintah maupun masyarakat kurang begitu baik. Pada pihak pemerintah, ada perasaan bahwa pemberitaan pers selama ini terkesan provokatif dan sensasional. Sebaliknya pihak masyarakat menganggap pers itu kurang berani menyampaikan sikap yang diperlukan (Jacob Oetama, 1996).

Dalam konteks ini, rumusan Dewan Pers tentang perlunya interaksi positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat, yang kemudian diperjuangkan masuk dalam *Garis-Garis Besar Haluan Negara* (GBHN). Tujuannya adalah meningkatkan peranan pers dalam pembangunan, baik nasional maupun di daerah. Keberadaan pers sebagai pilar keempat, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif diharapkan dapat mendukung dan mendorong bersama-sama pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan di segala bidang, terutama di Aceh, setelah terjadinya berbagai peristiwa, seperti konflik, gempa bumi dan tsunami, yang tidak hanya menghancurkan pembangunan, tetapi telah menghancurkan tatanan dan struktur sosial serta peradaban.

Dalam konteks membangun kembali dan merajut ulang tatanan kehidupan di Aceh, maka kehadiran pers sangatlah strategis untuk bermitra dengan pemerintah dan masyarakat, seperti dikatakan Merrill (1974), hubungan intim antara pemerintah dan media massa, kedua-duanya saling membutuhkan.

McQuail (1987), menambahkan bahwa prinsip-prinsip media pembangunan yang harus dilakukan adalah: 1) media harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejajar dengan dasar kebangsaan yang ditumbuhkan. 2) kebebasan media hendaklah terbuka kepada pengawasan berdasarkan: (a) kepentingan ekonomi; (b) keperluan pembangunan masyarakat. 3) media harus memberikan dari segi isi terhadap budaya dan bahasa nasional. 4) media harus memberikan keutamaan kepada berita dan informasi

yang berkaitan dengan negara membangun lain yang mempunyai kedekatan dari segi geografis, budaya, dan politik. 5) demi kepentingan pembangunan, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam operasi media, termasuk melarang untuk diberitakan, dan subsidi pemerintah. McQuail menambahkan, bahwa di negara sedang membangun, fungsi terpenting media adalah menyebarkan dan menafsir berita kepada masyarakat. Sedangkan mengenai hubungan media dengan pemerintah di negara membangun adalah berbeda dengan negara Barat. Media di negara membangun biasanya mempertahankan ideologi dan sistem politik pemerintah yang sudah ada.

Di Aceh, perkembangan pers (media massa) sangatlah pesat, baik cetak maupun elektronik. Media cetak misalnya dalam bentuk Harian lokal: *Serambi Indonesia*, *Harian Aceh*, *Rakyat Aceh*, dan *Aceh Independen*. Sedangkan Harian nasional yang masuk ke Aceh, yaitu: *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Waspada* (Medan) dan *Bisnis Indonesia*. Berbentuk Mingguan (Tabloid/Majalah), seperti *Kontras*, *Modus*, *Aceh Kita*, *Sipil*, *Aceh Magazine*, dan *Aceh Poin*. Media elektronik, seperti: televisi, yaitu: *TVRI* (Televisi Republik Indonesia), *Aceh TV*, *Rajawali Citra Televisi Indonesia* (RCTI), *Televisi Pendidikan Indonesia* (TPI), *Metro TV*, *Trans TV*, *SCTV*, *Indosiar*, *TV One*, *Global TV* dan *Trans 7*. Begitu pula radio (*broadcasting*), seperti: *Radio Republik Indonesia* (RRI), *Radio Baiturrahman*, *Prima FM*, *Nikoya FM*, *Antero FM*, *Serambi FM*, dan lain-lain.

Dengan gambaran perkembangan pers seperti ini di Aceh, lebih-lebih setelah tumbang rezim Orde Baru, pimpinan Soeharto yang sangat refresif terhadap pers, maka kini, pers tumbuh menjamur dimana-mana, tanpa harus memiliki izin yang ketat (SIUPP) untuk mendirikan.

Banyaknya pendirian pers seperti ini di Aceh, di satu sisi membawa dampak positif dan menggembirakan, setidaknya dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dan menyampaikan berbagai informasi pembangunan yang positif serta dapat menjadi alat kontrol sosial dan pemerintahan dalam membangun kembali Aceh pasca tragedi gempa bumi, tsunami dan konflik kekerasan.

Di sisi lain, kehadiran media massa yang menjamur seperti itu, tampaknya tidak lagi berorientasi sebagai mitra pemerintah dan masyarakat, tetapi lebih kepada kepentingan mengejar materil dan bisnis. Bukan untuk mempertahankan idealisme dan profesionalitas yang senantiasa merekat sebagai karakter pers pembangunan yang modern.

Oleh sebab itu, membangun interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Masalahnya adalah, bagaimana konsep interaksi positif ini bisa dihadirkan dan dikembangkan. Dalam arti, saling menguntungkan semua pihak, baik bagi pers itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakat. Karena dalam realitasnya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti tarik-menarik kepentingan ketiga komponen tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah terkesan masih lebih dominan, dan hanya menempatkan pers pada posisi “*sub-ordinated*”. Sedangkan masyarakat diposisikan semata-mata hanya sebagai penerima (objek) dari pembangunan semata-mata. Meskipun konsep interaksi positif ketiga komponen sudah berlangsung dalam masa yang lama, ternyata masih diwarnai berbagai penyimpangan, khususnya dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Hal semacam ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan, seperti: bagaimana dalam implementasinya, sehingga konsep “*interaksi positif*” ini seharusnya bisa melahirkan pers yang sehat, kuat, santun, bebas dan bertanggung jawab. Ternyata sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan masalah berikutnya, bagaimana upaya-upaya pembinaan dan pengembangan pers yang dilakukan pemerintah selama ini, terutama di Kota Banda Aceh.

Maka, untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut berangkat dari berbagai fenomena permasalahan yang telah dipapar sebelumnya, mendorong penulis untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam. Namun, mengingat keterbatasan penulis, maka fokus penyelidikan ini akan dibatasi pada persoalan menyangkut: “*Upaya Pembinaan Pers oleh Pemerintah melalui Kajian Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat di Kota Banda Aceh*”.

Pemilihan Kota Banda Aceh, sangatlah strategis yang didasari kepada: *pertama*, Kota Banda Aceh sebagai pusat penataan administrasi Pemerintah Aceh, sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Aceh. Jadi, banyak permasalahan timbul, termasuk persoalan pers itu sendiri dalam berinteraksi dengan pemerintah. *Kedua*, berita dan informasi yang setiap saat berkemabang dan berganti-ganti secara terus-menerus. *Ketiga*, persaingan (kompetensi) antar pekerja pers (wartawan) dalam “memburu” berita dan informasi, baik pekerja pers lokal maupun nasional. Bahkan pekerja pers Internasional.

C. Pemahaman, Kedudukan dan Fungsi Pers

Istilah pers terjemahan daripada bahasa Inggris “*press*” dan boleh dimaknai dengan dua pemahaman, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pers dalam pemahaman sempit adalah sebagai manifestasi dari istilah “*freedom of the press*”. Sedangkan dalam pemahaman luas merupakan manifestasi dari “*freedom of the speech*”. Kedua-duanya tercakup dalam pemahaman “*freedom of the expression*” (Rachmadi, 1990).

Pemahaman yang lebih luas lagi, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti *radio*, *televisi*, dan *film*. Demikian pula media cetak, seperti surat kabar (*Harian*, *Mingguan*, dan *Bulanan*), *majalah*, *tabloid*, *buletin* dan lain-lain. Kesemua media komunikasi ini berfungsi menyebarkan informasi, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang, atau kelompok orang kepada orang lain (Karnay, 1998).

Pers yang dimaksudkan dalam penelitian ini terbatas pada media cetak/surat kabar, sebagai media tertua di dunia. Dalam konteks ini, pers seperti tersebut dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1996 dan telah diubah menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1967, yakni: pers adalah lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur awaktu terbitnya, diperlengkapsi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil, atau alat-alat teknik lainnya. Di sisi lain, surat kabar, jugabertindak sebagai “*lembaga kemasyarakatan*” dan “*institusi sosial*”, yang merupakan bahagian dari integral daripada masyarakat dan saling mempengaruhi.

Pers, dengan aspek-aspeknya, yaitu: keprofesian, keusahaan dan keteknikan, selalu berada dalam himpitan dan tekanan. Di satu pihak, ada tekanan ekonomi dan di pihak lain, ada tekanan sosial dan politik. McQuail (1987), mencoba merincikannya, yakni kedua tekanan tersebut menyangkut: 1) pesaing, berita, pemasang iklan dan pemilik; 2) kejadian dan informasi konstan dan budaya; 3) kontrol hukum dan politik, serta lembaga sosial lain; 4) kepentingan dan tuntutan khalayak.

Menurut Cohen (1963), media massa, termasuk pers berperan sebagai penyampai informasi dan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu, atau persoalan yang disampaikan. McQuail (1987), menambahkan bahwa prinsip-prinsip media pembangunan adalah: 1) media harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejajar dengan dasar kebangsaan yang ditumbuhkan. 2) kebebasan media hendaklah terbuka kepada

pengawasan berdasarkan: (a) kepentingan ekonomi; (b) keperluan pembangunan masyarakat. 3) media harus memberikan dari segi isi terhadap budaya dan bahasa nasional. 4) media harus memberikan keutamaan kepada berita dan informasi yang berkaitan dengan negara membangun lain yang mempunyai kedekatan dari segi geografis, budaya, dan politik. 5) demi kepentingan pembangunan, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam operasi media, termasuk melarang untuk diberitakan, dan subsidi pemerintah.

Dalam konteks ini, pers berfungsi, tidak hanya sebagai subjek pembangunan, juga sekaligus sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, pers harus mampu berperan sebagai alat kontrol sosial terhadap gerak dan dinamika pembangunan dan sekaligus berperan menyukseskan pembangunan. Sebagai objek pembangunan, pers, secara terus-menerus harus membenah dan membangun dirinya sendiri. Sehingga, pers yang muncul hari ini bukanlah pers yang pasif, tetapi pers yang aktif, dinamis dan kreatif.

D. Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat

Rumusan Dewan Pers tentang “*Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat*” ini telah menjadi keputusan resmi GBHN (*Garis-Garis Besar Haluan Negara*). Tujuannya adalah meningkatkan peran pers dalam pembangunan nasional. Sehingga pers dalam perkembangannya menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan visi dan misinya kepada khalayak yang lebih sehat, damai dan santun.

Meskipun, menurut Suwardi (1993), dalam proses perjalanan sejarah bangsa, pers dan negara senantiasa tumbuh dan berkembang dalam wujud dan bentuk yang berbeda. Bahkan, kadang-kadang alternatif dan *vis a vis*. Kebebasan pers pun mengalami pasang naik dan pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat di mana pers itu berada.

Tribuana Said (1997), menambahkan bahwa, sering menimbulkan masalah ketiga komponen yang melakukan interaksi, pers, penyelenggara negara, dan masyarakat. Sebab, dalam proses interaksi yang berwujud penyaluran informasi dan opini, boleh saja terjadi kesalahan dan perbebedaan. Bahkan, benturan-benturan, apalagi, dalam masyarakat yang menempatkan pengamalan kemerdekaan pers sebagai salah satu fondasi kehidupan demokrasi.

Lain halnya dengan pandangan Mohd. Safar (1993), bahwa, penciptaan sistem media senantiasa peduli kepada kebijakan dan keperluan negara yang diwakilinya dengan

melihat bentuk, struktur dan politik di mana ianya beroperasi. Ia mencerminkan sistem pengawasan sosial yang mungkin berbentuk undang-undang, politik, ekonomi, atau sosial, dimana hubungan individu dan institusi disesuaikan. Keadaan ini memperjelas sistem media sebuah negara, mungkin sistem tersebut tidak sama dengan negara lain dan perubahan juga berkemungkinan berlaku akibat faktor alam sekitar yang mempengaruhi perjalanannya.

Terkait dengan perjalanan pers, seperti yang disebut Mohd. Safar di atas, maka teori media negara membangun yang dikembangkan Hachten (1981) ada kesamaan, terutama dengan mengaitkan dengan pengaruh sistem politik dan ekonomi suatu negara terhadap keberadaan media. Meskipun, konsep teori media negara membangun ini merupakan perubahan dari empat teori media yang telah dikembangkan oleh pakar-pakar media, seperti Siebert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956. Hachten (1981), lebih lanjut mengatakan bahwa, media di negara-negara membangun, atau negara-negara Dunia Ketiga, sering mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun negara. Bahkan, kata Hachten, kebebasan mutlak suatu media adalah sebuah dongeng belaka.

Dalam konteks tugasnya, antara pers dan pemerintah memang terdapat perbedaan. Namun, di dalam sistem yang hidup di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan nasional, mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu: memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jelas, bahwa pers Indonesia bukanlah pers yang benar-benar bebas dan berdiri di luar garis perjuangan, akan tetapi pers yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Pendapat Suwardi (1993), bahwa pers di manapun, terutama di negara-negara sedang berkembang yang senantiasa mengutamakan stabilitas politik. Maka, pada posisi yang demikian, pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai “*penyeimbang*” di antara kekuatan-kekuatan yang ada. Banyak media massa yang mengkhawatirkan keberadaan mereka sewaktu-waktu bakal *dibreidel*. Sepanjang periode tersebut hingga “*Peristiwa Malari*”, orientasi pers Indonesia dicabut, bila tidak mengikuti aturan main yang berlaku. Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya, pers tidak jarang memilih jalan tengah. Cara inilah yang sering mendorong pers bersikap “*mendua*” terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan tingkat kepekaan nasional.

Abar (1996), mengatakan: Indonesia, misalnya, di bawah pemerintah Orde Baru, pernah mengenal suatu dekade 1966-1974, dimana pers bersifat “*kritis*” terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan berbagai penyimpangan kekuasaan. Pada periode ini, pers berani mengkritik penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan, membongkar korupsi yang merajalela di tubuh negara, mengecam ketidakadilan dan ketimpangan-ketimpangan akibat pembangunan, serta mengkritik strategi pembangunan yang dianggap kapitalistik, dan lain-lain.

Pernyataan Abar di atas, didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukannya tentang “*Pers Indonesia 1966-1974*”. Hasilnya terungkap, pers lebih banyak berpihak kepada rakyat ketika itu. Kemudian, pers Indonesia berubah menjadi lebih banyak kepada negara dan pers lebih bersifat “*elite-birokratis*”, serta bersikap “*retoris-normatif*”. Maka timbullah pemikiran dan gagasan di kalangan masyarakat pers yang dipelopori “*Dewan Pers*”, tentang bagaimana mengatasi masalah hubungan pers dan pemerintah, serta antara pers dengan masyarakat semakin kurang harmonis. Maka, tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan jalinan kerjasama yang bersifat “*kemitraan*”, yang selanjutnya disebut: “*Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat*”. Dengan konsep ini diharapkan lahir pers yang sehat, santun, bebas dan bertanggung jawab. Apalagi di Aceh yang ingin mempertahankan suasana damai berkelanjutan dan abadi.

E. Penutup

Bahwa, perjalanan kehidupan pers tidaklah semulus yang dibayangkan. Lebih-lebih ketika berhadapan dengan poros kekuasaan yang berbau tirani. Di sisi lain, ada komponen publik yang kebingungan dalam konteks memberi dukungan dan kepemihakan (apakah berpihak kepada pemerintah, atawa kepada pers) . Karena, ketiga komponen ini (pemerintah, pers dan masyarakat) secara alami saling membutuhkan. Pers dalam kondisi apa pun, tidak bisa berdiri sendiri. Terutama jika tidak ada justifikasi dari publik. Demikian pula pemerintah, sangat naïf jika tidak mendapat justifikasi dari masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitas eksekutifnya. Dalam konteks ini, masyarakat juga sangat perlu dukungan pers dan pemerintah dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat ini. Terutama menyangkut dengan anggaran dan publikasi. Maka, kebutuhan dan ketergantungan terhadap media/pers hari ini dan ke depan menjadi sesuatu yang sangat primer dan tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu!. Simpulanya adalah, interaksi positif dan

saling ketergantungan antara pers, pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan dalam berbagai kondisi dan situasi. Termasuk kehadirannya dalam mendukung dan mempertahankan Susana damai di Aceh berkelanjutan (*suistanable*)!.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abar, Akhmad Zaini, 1995, Kisah pers Indonesia, 1966-1974, Yogyakarta, LKIS.
- Abrar, Ana Nadhya, 1995, Panduan Buat Pers Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arifin, Marzuki, 1990, Fakta Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974, Indonesia, Publishing House.
- Basuki, Wishnu, 1995, Pers dan Penguasa, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Cohen, J.L, and Anto A, 1992, Civil Society and Political Theory, Massachusset, MIT Press.
- Harahap, Krisna, 1996, Kebebasan Pers di Indonesia, Bandung, PT. Grafitri Budi Utami.
- Jalaluddin, Rakhmat, 1985, Metodologi Penelitian Komunikasi, Bandung, PT. Rosda Karya.
- Lesmana, Cipta, 1985, 20 Tahun Kompas-Profil Pers Indonesia Dewasa ini, Jakarta, Erwin Erika Press.
- Lincol, Yvonna, S & Egon G. Guba, 1985, Naturistik Inquiry, London, New Delhi, Sage Publications.
- McQuail, Dennis, 1989, Teori Komunikasi Massa (ed.Terj), Jakarta, Erlangga.
- Moleong, Lexy, J, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosda karya.
- Muhajir, Noeng, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin
- Oetama, Yacob, 1987, Profil Pers Indonesia, Jakarta, LP3ES.

Said, Tribuana, 1988, Sejarah Pers Nasional dan Perkembangan Pers Pancasila, Jakarta, CV haji Masagung.

{ { {

